

Opini Budaya:

"Guyub", Realitas Masyarakat Reaktif

oleh DADAN SUWARNA



KERJA sama antarwarga dalam solidaritas dan toleransi positif hampir bergeser pemaknaannya. Kondisi sosial-ekonomi memindahkan kepentingan sosial ke arah kepentingan personal. Siapakah kini yang paham lingkungan kita, siapakah kini yang mengetahui kiri-kanan tetangga kita?

"Guyub" dewasa ini adalah perilaku bersama dalam menghadapi persoalan bersama dengan melakukan aksi. Ini semata-mata dilakukan karena kita menjadi bagian korban dari pihak lain. Makna kini kebersamaan itu adalah tindak-tanduk reaktif.

Dulu, musyawarah, silaturahmi, adalah pemandangan sehari-hari. Bahkan, *Tahlilan* bukan sekadar ritual keagamaan, tetapi kebersamaan warga akan penderitaan sesama. Kini keguyuban dalam segala hal tak lebih dari penggalangan massal ketika orientasi politik dilakukan calon-calon lurah (kepala desa), walikota, bupati, hingga gubernur, presiden di tiap daerah. "Guyub" kemudian jadi begitu mengalami penyempitan makna, nyaris pada keakuan sosio-politis.

"Guyub" dijelaskan pada tipikal masyarakat anarkistis yang bersepakat dengan aturan sendiri, melawan dengan caranya sendiri. Perbedaan pendapat diakhiri dengan konfrontasi dua kubu sebagai bagian dari masyarakat yang menyatakan dirinya "guyub".

Norma-norma sosial dilahirkan oleh komunitas sosial yang memandang baik-buruk adalah dalam tataran nilai yang ideal. Realitas adalah kenyataan, tempat idealitas bermuara. Bahkan sangat mungkin ditundukkan. Yang terjadi kemudian aturan personal, pengampu nilai “paling ideal”. Bertemunya keakuan adalah pola laku yang diwadahi kemudian.

“Guyub” adalah realitas sosial yang berkaitan dengan sikap-sikap normatif dan implikasinya menanggapi kenyataan yang ada. Pada awalnya begitu ideal ketika nilai di-*filter* demi kemaslahatan massal. Cara pandang sosial yang diayomi kepentingan kuasa mengarahkan guyub jadi tendensi; lahirlah baik-buruk, benar-salah sebagai sebuah asumsi, sudut pandang keakuan yang seringkali jauh dari proporsi kesucian.

Nilai adalah apa yang kemudian diposisikan. Bukan tentang objektivitas sepatutnya direduksi. Nilai akibatnya ditempatkan dalam bingkai yang personal dan subjektif, kepentingannya bergantung apa dan untuk siapa. Cara pandang terakhir adalah superioritas, tempat segala kepentingan kuasa berlabuh dan melahirkan bentuk-bentuk otoritarianisme. Lahirlah kemudian kontroversi apa pun secara tarik ulur, tidak netral, bergantung konteks sosialnya apa. Pembunuhan kemudian tak selesai dalam jerat hukum si terdakwa. Atas nama apologi, pembalasan dari keluarga korban diamini, “nyawa harus dibayar nyawa”.

Makna “Guyub”

“Guyub” adalah kata sifat yang artinya rukun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kemudian menafsirkan paguyuban dengan kelompok yang ikatan sosialnya didasari oleh ikatan perseorangan yang kuat.

“Guyub” mulanya adalah kebersamaan. Di baliknya adalah manifestasi dari sikap-sikap positif komunitas manusia. Relevansi sosialnya tecermin dari sikap-sikap yang harmoni, terutama ketika silaturahmi sosial terentang dalam gotong royong, *tepo salira*, atau aktivitas

yang konstruktif. Suara *sepuh* diamini dalam musyawarah, yang muda dihargai. Kesepakatan diserahkan pada forum guna menyepakati nilai-nilai demokratis dan aspiratif, dengan mengedepankan etika ketertiban, keamanan, dan kenyamanan bersama.

Ketidaguyuban adalah pantangan. Lingkungan ibarat kerangka keluarga, segalanya harus saling pancang dan topang. Ibarat tubuh, satu anatomi yang bermasalah, ia adalah persoalan bagi anatomi yang lainnya. Begitupun kata *guyub*, selama keputusan itu A dan terjadi pelanggaran atas keputusan yang A, pelanggarnya akan dipandang *nyeleneh* dan aneh, menyalahi aturan normatif bersama dan pantas “diarak” massa. Sikap-sikap yang dipandang tidak kompak dianggap tidak menyuarakan kebersamaan untuk ‘senasib dan sepenanggungan’.

Dukung-mendukung kemudian lahir sebagai manifestasi kebersamaan untuk menyepakati apa pun dan siapa pun meski tanpa berpikir lagi substansial tidaknya sebuah alasan. Parahnya, di kubu lain, atas nama keguyuban yang lain, muncul penolakan, semacam sikap kontra yang dianggap tidak menampung kepentingan yang lain berikut perspektif kebenaran yang lain.

Politisasi

“Guyub” jadi bola bekel, yang bergerak bebas terserah siapa yang memantulkan dan ke mana arah pantulan digerakkan. Akibatnya, terjadi bias pemaknaan dua atau tiga pihak bergantung subjektivitas moral, kultural, bahkan personal. Mayoritas diadopsi dengan mengasumsi minoritas patut ditepikan karena kebenaran mengimplementasikan rasionalitas angka. Artinya, kebenaran adalah penjumlahan tertinggi dan itu berarti menghitung akumulasi personal yang menyuarakan kesepakatan.

Pemenang ditakar berdasarkan angka sebagai kuantifikasi kebenaran satu-satunya dibandingkan hal-hal yang tak terukur, seperti kemampuan, kecerdasan, keyakinan, kebenaran,

dll. Belum lagi, musyawarah memandang kata akhir mufakat yang notabene menjumlah orang dan bukannya kualitas gagasan sebagai keputusan akhir, bahkan diembel-embeli: keputusan tidak dapat diganggu-gugat. Sebagai produk “mufakat”, kesepakatan mengikat manusia untuk bersikap sesuai “kepatutan” dan “kesepakatan”.

Identitas kemudian disalin, diubah, dan dipaksakan sepihak. Ia bukan proses genetis dan sosialisasi seseorang memproses hidup. Identitas kemudian diseragamkan. Uniformitas seakan-akan sebuah relasi sosial melegitimasi diri dan atribut keakuan. Diri yang megalomaniak dikedepankan semata-mata identitas adalah superioritas baju. Kebanggaan kemudian jadi salah kaprah dengan memupuk kekuatan dan kekerasan fisik sebagai pilihan logis hidup kompetitif dan kalkulatif. Atas nama panglima diri, apa pun dihalalkan, tanpa perlu-tidaknya etika diusung atau tidak.

Keseragaman yang sifatnya badaniah (lahiriah) dianggap substansi nilai. Dikenakan sebagai cara mengaktualisasi diri. Satu kata, satu sikap diproyeksi dalam argumentasi satu kelompok dan satu kepentingan. Esensi apapun harus bermuara pada eksklusivisme kepentingan.

Konfrontasi antarpihak kemudian terjadi karena masing-masing menempatkan kekerasan melawan adalah cara membangun harga tawar. Harga kemanusiaan yang teramat mahal kemudian begitu gampang dikangkangi kepentingan polititis dan ekonomi. Apalagi “urusan perut” jadi sebuah pembenar bagaimana agar aturan diminimalisasi dengan diri adalah pusat narasi kebenaran.

Keguyuban akibatnya manipulatif dan semu. Sepakat dan tidak bukan lagi sikap alami, tetapi solidaritas mengamini. Semacam *wait and see* yang berkenaan pertimbangan menyamanan dan mengamankan diri. Akibatnya, atas nama toleranis, seringkali manusia berbenturan pada “kebersamaan” konfrontatif. Bahwa mulanya ada dua individu yang berbeda

pendapat, ditengahi oleh kepentingan yang mengatasnamakan “sesama” demi menerima atau menolak alasan apa pun, termasuk alur berpikir artikulatif dan argumentatif. Memelihara silaturahmi jadi masalah karena intrik yang diperbesar memperlebar relasi sosial sesama.

Lahirnya kepentingan, terutama politis, memaksa hubungan antarmanusia bukan lagi berbeda sebagai pilihan sikap tetapi juga keamanan politis. Disharmoni bukan lagi tercipta tetapi diciptakan. Kesalehan personal terkalahkan oleh pesan kepentingan yang memandang perbedaan harus diintimidasi. Padahal, disharmoni seringkali berasal dari selubung gelap, oknum, atau bahkan para dalang yang mengail di air keruh, tanpa tahu wujudnya nurannya siapa dan seperti apa. Implikasi dari adanya adu domba antarmanusia, lahir dari gagalnya kita membaca realitas kegelapan yang ada.

Pro-kontra kemudian marak karena alasan-alasan argumentatif dan apologis. Kausalitas kebenaran jadi pembenaran seutuhnya semata-mata konsekuensi hasil adalah yang hal nomor satu dibandingkan dengan memandang proses sebagai aturan bermain. Apa yang salah kemudian dibenarkan, dan yang benar kemudian disalahkan.

Rumor diyakini sebagai kebenaran esensial dibandingkan dengan kebenaran yang logis. Anarki tercipta sebagai bias keinginan “seseorang” memaksakan kehendak dan memanfaatkan tangan-tangan kebodohan dimainkan. Kebodohan adalah sumbu yang ditunggu sebagai kesempatan mengobarkan manifestasi kehendak mencipta *chaos*.

Guyub mengenyahkan kapasitas individual demi mengusung kepentingan kolektif dan pembenarannya. Yang dibutuhkan adalah suara bersama akan masalah apa pun, tanpa melihat personalitas diri yang khas, unik, dan memang senyatanya berbeda. Yang dipandang adalah kesepakatan massal sebagai sebuah harga tawar posisi, kesempatan, dan “peluang” memanfaatkan momen yang dihadapi. Itulah sebabnya, *silent majority*, misalnya, seringkali baru mengejutkan karena ia berada di luar perhitungan yang diprediksi keguyuban.

Keguyuban jadi “hasil” yang dianggap lebih penting dibandingkan dengan artikulasi memproses hasil yang senyatanya argumentatif itu. “Kesetian” dianggap teladan, “pembangkangan” dianggap masalah. Keguyuban dianggap suara “kemaslahatan bersama”. Amatilah kemudian dalam pemilihan kepala desa, walikota, bupati, gubernur, dua pihak yang berkonflik berasal dari suara yang menyatakan dirinya “benar”.

“Guyub” kemudian demikian bersifat ideologis, lahir dari sebuah konsekuensi menyikapi yang tak lebih dari penggalangan massa demi satu kepentingan yang sama, yaitu kepentinganku. Situasi sosial politik menjelaskan hal itu kepada kita. Massa diakomodasi, massa direduksi, selebihnya mereka dibiarkan “berteriak sendiri”.

**Dadan Suwarna, Dosen Tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (FISIB), dan
tidak Tetap di FKIP dan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan**

